

## Media dan Rantai Peringatan

### Peran Media dalam Kesiapsiagaan Bencana

#### PRAKARSA

Dalam manajemen risiko bencana, media memainkan peran penting untuk menyelamatkan nyawa. Pada sebagian besar kejadian, awak media di seluruh dunia sigap melaporkan bencana dan berhasil menarik perhatian masyarakat. Ini menunjukkan betapa media berperan besar sebagai sumber informasi utama masyarakat. Media diharapkan untuk memperluas perannya, tidak semata tertuju pada pemberitaan tentang bencana yang terjadi, tetapi juga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana dan menyiarkan pesan peringatan bencana.

#### MENYAMPAIKAN PERINGATAN ANCAMAN TSUNAMI

Tsunami lokal terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan respon penyelamatan nyawa secara cepat. Untuk memastikan peringatan menjangkau masyarakat berisiko tepat waktu, *Indonesian Tsunami Early Warning System (InaTEWS)* membangun sistem penyebaran peringatan dengan melibatkan stasiun Televisi (TV) dan radio yang memiliki kemampuan menyebarkan informasi secara luas dalam waktu singkat. Tahun 2006, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) mengeluarkan Peraturan No. 20/2006 yang berisi peran stasiun TV dan radio dalam menyampaikan pesan peringatan bencana. Peraturan menteri ini menjadi pedoman penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50/2005 (Pasal 17) tentang kewajiban lembaga penyiaran untuk menyebarkan informasi peringatan tentang kemungkinan munculnya bencana.

Dalam pelaksanaannya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai *National Tsunami Warning Center (NTWC)*, telah memasang server di beberapa stasiun TV dan radio nasional agar dapat menerima dan menyiarkan peringatan tsunami di area cakupannya. Stasiun TV dan radio wajib menghentikan tayangannya untuk mengumumkan pesan peringatan bencana. TV akan menyiarkan nada tinggi sebagai tanda peringatan untuk menarik perhatian pemirsa, dan pada saat bersamaan layar menayangkan pesan peringatan yang diikuti dengan teks berjalan (*running text*).

Di kabupaten-kabupaten berisiko tsunami, stasiun TV dan radio setempat juga diharapkan menyebarkan peringatan dan arahan dari pemerintah ke masyarakat. Berdasarkan pengalaman, stasiun radio merupakan media yang andal untuk menyebarkan peringatan, jika mereka memiliki daya cadangan untuk mengatasi putusnya aliran listrik setelah gempa. Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu duduk bersama dengan stasiun TV dan radio setempat untuk mengatur prosedur yang jelas dalam penyebaran peringatan dan informasi.

#### PENGALAMAN DARI PADANG DAN BALI

**Padang**, lima menit setelah gempa tanggal 30 September 2009, Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS) menyebarkan pesan "tidak ada ancaman tsunami" kepada beberapa lembaga dan pemangku kepentingan melalui *Handy Talkie (HT)*, tetapi masyarakat baru menerimanya 25-30 menit kemudian, ketika Radio Republik Indonesia (RRI) menyebarkan pesan melalui *Frequency Modulation (FM)*. Pada saat itu jalan-jalan telah menjadi lautan manusia yang ingin menyelamatkan diri. Sesungguhnya, informasi tersebut dapat mencapai masyarakat lebih cepat bila PUSDALOPS memiliki akses langsung ke FM. Masalah ini membutuhkan solusi berupa prosedur teknis, persetujuan, dan keputusan politis yang jelas.





Bali, pada tanggal 28 Januari 2010 PUSDALOPS Provinsi bersama stasiun TV dan radio setempat menandatangani persetujuan tentang penyebaran peringatan dini tsunami. PUSDALOPS akan menyebarkan peringatan tsunami dan arahan penyelamatan diri kepada media setempat. Langkah selanjutnya yang harus diambil adalah penyusunan *Standard Operation Procedure* (SOP) dan pelaksanaan pelatihan untuk personel media

## PENDIDIKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Tidak hanya meneruskan peringatan tsunami, media juga perlu mengambil peran dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana melalui penerbitan dan penyiaran informasi yang relevan dengan menyederhanakan konsep-konsep yang kompleks dan ilmiah menjadi informasi yang mudah dimengerti masyarakat.

## TANTANGAN

Menyebarkan pesan peringatan tsunami ke masyarakat tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyebaran peringatan:

- Prosedur yang jelas

Stasiun TV dan radio memerlukan prosedur jelas tentang cara menyebarkan peringatan dengan segera. Beberapa media telah memiliki prosedur penyebaran peringatan. Saat ini, SOP sedang dalam proses pengembangan di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), untuk digunakan dan disesuaikan dengan prosedur masing-masing media.

- Isi pesan yang harus disebarkan ke masyarakat

Tanggung jawab BMKG hanya mengirimkan peringatan, bukan memberi arahan evakuasi, tetapi peringatan tanpa arahan yang jelas menimbulkan reaksi yang tidak konsisten. Isi pesan peringatan masih dikembangkan secara terus-menerus. Pesan peringatan seharusnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan: Apa yang terjadi dan yang harus dilakukan? Di mana terjadinya? Siapa yang terlibat? Kapan terjadi? Bagaimana terjadinya?

- Pemahaman yang jelas tentang bagaimana sistem tersebut bekerja

Untuk mengerti tentang InaTEWS, redaktur stasiun TV dan radio membutuhkan informasi yang jelas tentang sistem *end to end*. Media mengharapkan BMKG menunjuk seorang *contact person* (dan bahkan sebuah *media center*) untuk memeriksa kembali dan melakukan klarifikasi ketika sebuah peringatan dikeluarkan.

Diskusi tentang peran media dalam peringatan dini tsunami dilakukan selama persiapan *Indian Ocean Wave Exercise 2009* (IOWave09) dan diikuti oleh beberapa pertemuan kerja (terutama didukung oleh BMKG, LIPI, UNESCO, dan INWent). Untuk memantapkan hubungan antara media dan InaTEWS, diskusi yang terus-menerus perlu dilanjutkan.



Stasiun-stasiun TV dan Radio Indonesia yang Terhubung dengan BMKG

## DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah No. 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
- Undang-undang No. 32/2002 tentang Penyiaran
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20/2006 tentang Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya melalui Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia

### Penulis:

Erma Maghfiroh  
erma.maghfiroh@gtz.de

### Diterbitkan oleh:

Deutsche  
Gesellschaft für  
Technische  
Zusammenarbeit  
(GTZ) GmbH

### Foto:

© GTZ IS-GITEWS

GTZ Office Jakarta  
Menara BCA 46th Floor  
Jl. M.H. Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
T: +62-21-2358 7111  
F: +62-21-2358 7110  
E: gtz-indonesien@gtz.de  
I: www.gtz.de/indonesia

### Informasi lebih lanjut:

www.gitews.org/tsunami-kit  
BMKG: www.bmkg.go.id  
DEPKOMINFO: www.depkominfo.go.id  
Jakarta Tsunami Information Center:  
www.jtic.org  
HRDP Platform:  
http://pirba.hrdp-network.com  
GITEWS: www.gitews.org